

ANALISIS ISU KONTEMPORER

Tutor : Qurrotu Aini, S.Psi.,M.Pd

Angkatan X _ Kelompok 1:

1. Andrian Pratomo, S.I.P
2. Deta Puji Kesuma, S.Pd
3. Devy Septianasari, S.Pd
4. Komariah, S.Psi.,M.Pd

A. Deskripsi isu Aktual

1. Isu Pencemaran Nama baik melalui Media sosial

Pencemaran nama baik adalah kasus yang paling sering terjadi dalam komunikasi massa terutama di media sosial, baik dilakukan secara sengaja ataupun karena bocor tanpa sengaja ke ruang public, seperti kasus pencemaran nama baik yang dilakukan Dr. Richard Lee terhadap seorang artis bernama Kartika Putri. Kasus ini bermula dari unggahan video di chanel youtube Dr. Richard Lee tentang ulasan terkait produk kecantikan yang dimiliki Kartika Putri yang mengandung merkuri berbahaya. Video ulasan tersebut membuat Kartika Putri sebagai duta produk Helwa tidak senang. Kartika Putri tidak terima produk yang meng-endorse-nya disebut berbahaya. Isu pencemaran nama baik ini berujung dengan pelaporan Kartika Putri ke Polda Metro Jaya terhadap Dr. Richard Lee dengan dakwaan Pencemaran nama baik dan berujung dengan penangkapan Dr. Richard Lee.

2. Isu Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19

Isu korupsi sudah marak dari zaman dahulu kala. Korupsi dapat diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang Negara (perusahaan) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Seperti kasus korupsi dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan oleh bekas Menteri sosial Juliari Batubara, dimana Juliari Batubara mengelola 1,6 juta paket dari 1,9 juta paket bantuan sosial. Paket pengadaan tersebut untuk pengadaan Bantuan sosial penanganan Covid 19 pada Kementerian sosial Tahun Anggaran 2020 berupa pengadaan sembako. Dalam kasus ini mantan Menteri sosial Juliari Batubara dituntut 11 Tahun Penjara.

3. Isu Peningkatan kasus Penyalahgunaan Napza (Narkoba) dimasa Pandemi Covid-19

Penyalahgunaan Napza terutama Narkoba merupakan penggunaan Narkoba tidak sesuai dengan standar pengobatan atau disalahgunakan sehingga menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Seperti kasus terbaru yang menimpa artis Nia Ramadhani dan suami, serta kasus yang banyak menimpa beberapa artis

lain seperti Anji dan seorang sosialita yang juga pengusaha Jennifer Jill, yang berujung ditangkap, ada Sebagian dari mereka harus di penjara dan ada juga yang harus menjalani rehabilitasi.

B. Menentukan *current issue*

Analisis APKK

Melalui analisis APKK (Aktual, Problematika, Kelayakan, Kekhalayakan, dari hasil diskusi kelompok kami yaitu sebagai berikut:

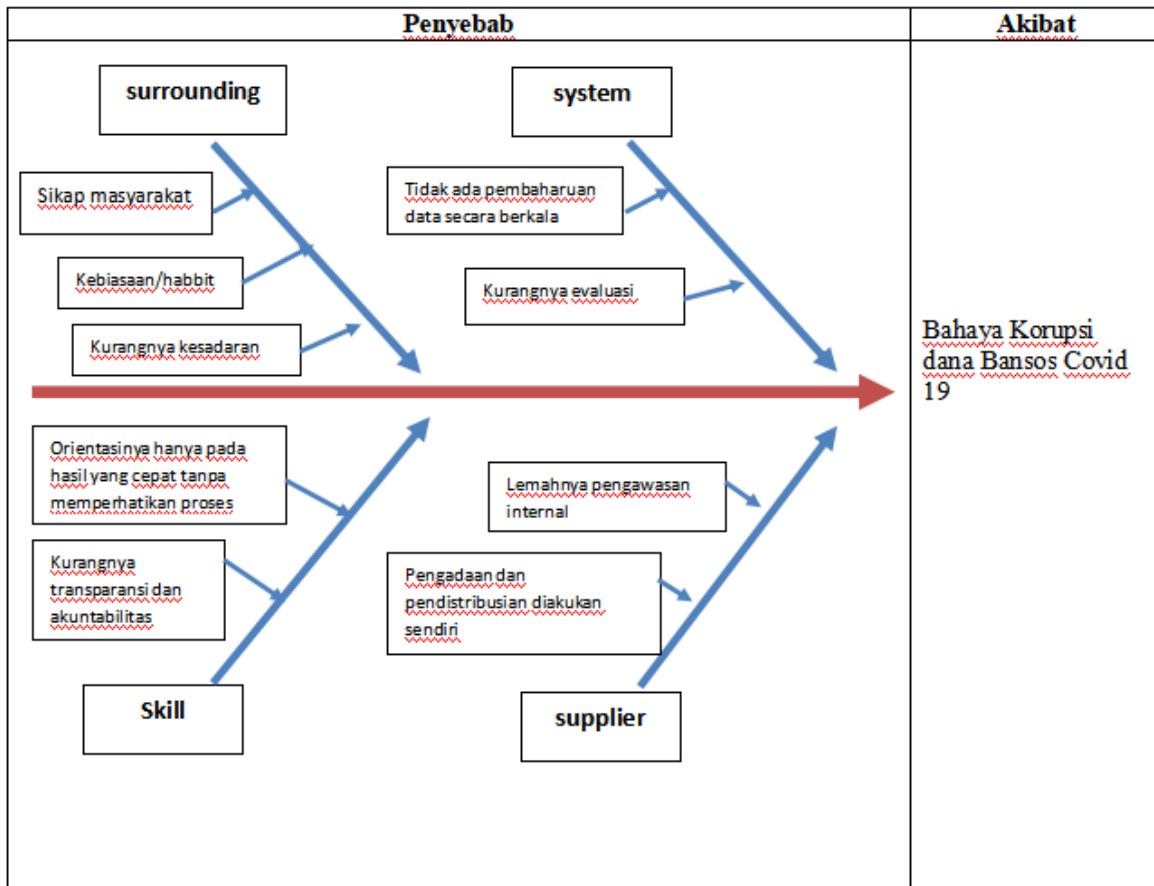
No	Isu	Aktual	Problematika	Kelayakan	Kekhalayakan	Kesimpulan
1	Isu Pencemaran Nama baik melalui Media social	v	v	x	x	Tidak
2	Isu Korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Covid-19	v	v	v	v	Ya
3	Isu Peningkatan kasus Penyalahgunaan Napza (Narkoba) dimasa Pandemi Covid-19	v	v	v	x	Tidak

Dari ketiga isu diatas, kami menganalisis bahwa dua isu memiliki kelayakan, akan tetapi dalam kekhalayakan hanya satu isu yang memiliki kekhalayakan, sehingga kami memilih isu korupsi dana bantuan sosial (bansos), menurut kami isu kedua tersebut merupakan isu yang mendapat perhatian dan sorotan public secara luas, sehingga memerlukan penanganan sesegera mungkin dari pengambil keputusan. Karena isu tersebut merugikan negara maupun masyarakat. Berikut penjelasan berdasarkan analisis dan pemilihan isu diatas:

Aspek	Penjelasan
Aktual	Isu yang terpilih merupakan isu yang terus menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan isu ini berlangsung pada lingkungan masyarakat, baik masyarakat atas, menengah maupun bawah dan berakibat pada masyarakat itu sendiri.
Problematika	Isu Terpilih memiliki problematika yang kompleks, sehingga permasalahan tersebut dibutuhkan adanya penyelesaian segera.
Kelayakan	Isu Terpilih merupakan isu yang realistis, masuk akal dan dapat diuji, sehingga inisiatif pemecahan nya dapat dilaksanakan (isu pelanggaran hukum yang ada di Indonesia)
Kekhalayakan	Isu Terpilih merupakan isu yang menyangkut kehidupan khalayak masyarakat dan merugikan negara.

Analisis *Brainstorming*

Dari isu-isu diatas yang dinilai memiliki kelayakan, kami memutuskan untuk memilih isu kedua. Isu kedua memiliki sebab-sebab potensial paling menonjol, melalui analisis *Brainstorming* berikut gambaran penyebab dan akibat dari isu Korupsi dana Bansos covid 19.



C. Penyebab Terjadinya Isu

Beberapa penyebab terjadinya korupsi dana Bansos Covid 19 adalah :

1. Lemahnya pengawasan internal pemerintah.
 “Posisi Inspektorat di bawah Menteri itu beresiko tinggi. Di Negara lain posisinya independen langsung di bawah Presiden. Tapi di Indonesia menteri tidak mau diatur-atur. Harusnya bila pengawasan internal kuat bias meminimalisir celah korupsi. Godaan korupsi sangat besar bila pakai cara lama dengan penunjukan langsung,” ujar anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah dalam siaran live Market di IDX Channel, Jakarta.
2. Pemerintah sering melupakan proses evaluasi dan whistleblower system.
 Meskipun di awal pandemi langkah pemerintah sudah tepat dengan orientasi pada kecepatan di lapangan, namun harus juga disertai dengan evaluasi setiap bulannya dan membenahi sistem penyaluran bansos.

3. Pemerintah terkadang melupakan proses, transparansi dan akuntabilitas namun yang terpaku pada hasil.
4. Dalam bansos sembako, pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. hal ini memberikan ruang sangat besar bagi vendor untuk melakukan penyelewengan.
5. Data penyaluran Bansos tidak diperbaharui setiap tahunnya (menggunakan data lama).

D. Dampak yang Terjadi Jika Isu Tidak Dicegah

Isu permasalahan yang terjadi akibat korupsi dana bantuan sosial (bansos) covid-19 apabila tidak segera diselesaikan akan berdampak sebagai berikut:

1. Salah satu dampak terbesar dari pandemi covid-19 bagi penduduk Indonesia adalah ekonomi. Kasus korupsi bansos dan potensi kasus lainnya akan berdampak pada semakin lamanya pemulihan ekonomi di masyarakat.
2. Rendahnya konsumsi masyarakat karena menurunnya penghasilan mengakibatkan resesi.
3. Melemahnya bidang investasi dan berimplikasi terhadap berhentinya berbagai bidang usaha.
4. Demoralisasi, masyarakat menjadi individualistis karena tidak ada rasa kepercayaan terhadap pemerintah, sistem, hukum, bahkan masyarakat itu sendiri.
5. Meningkatnya angka kriminalitas seiring banyaknya pengangguran akibat PHK.

E. Matrik SWOT Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

	Kekuatan	Kelemahan
I n t e r n a l	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah memiliki Badan Inspektorat dan Satuan Pengendali Internal untuk mengawasi dan pencegahan tindakan korupsi di lembaga pemerintahan. 2) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyebabkan anggaran publik mudah diakses oleh masyarakat. 3) Pemerintah memiliki <i>website</i> untuk mempublikasikan kinerja berbasis anggaran. 4) Pemerintah memiliki sumber daya Manusia (personil) dan peralatan tugas pemerintahan yang memadai. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Posisi badan inspektorat ada di bawah Menteri beresiko tinggi. 2) Pemerintah sering melupakan proses evaluasi dan whistleblower system. Meskipun di awal pandemi langkah pemerintah sudah tepat dengan orientasi pada kecepatan di lapangan, namun harus juga disertai dengan evaluasi setiap bulannya dan membenahi sistem penyaluran bansos. 3) Pemerintah sering melupakan proses, transparansi dan akuntabilitas (hanya mengejar hasil) 4) Dalam Bansos sembako, pemerintah melakukan pengadaan dan mendistribusikannya sendiri. Model ini memberikan ruang sangat besar bagi vendor untuk bermain.

		5) Data penyaluran Bansos tidak diperbaharui setiap tahunnya (menggunakan data lama).
E k s t e r n a l	Peluang <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengelolaan anggaran pemerintah diawasi oleh masyarakat dan aparat penegak hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, NGO/LSM, media massa, dan masyarakat); 2) Era digitalisasi memudahkan akses informasi dan pengawasan publik; 3) Nawacita Revolusi Mental yang digagas oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk memberantas korupsi sampai ke daerah-daerah; 4) Seluruh kegiatan Bansos, pengelolaan proyek dan tender melalui internet (LPSE); 5) Ratusan kasus terjaring Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (OTT KPK), termasuk kepala daerah dan ASN. 	Ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemajuan informasi dan teknologi serta pengalaman membentuk strategi baru menyembunyi kan korupsi dalam organisasi, seperti pada pelelangan proyek di pemerintahan. 2) Tim sukses yang selalu membayangi kinerja pemerintahan karena kepentingan balas jasa. 3) Penegakan hukum yang lemah karena kongkalikong, gratifikasi, dan tekanan politik.

F. Upaya Rekomendasi Pencegahan

1. Harus diadakannya monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan Bantuan Sosial Covid-19 untuk mengantisipasi penyelewengan dana maupun bentuk fisis daripada bantuan.
2. Pemerintah pusat dan daerah harus memadukan data penerima bantuan sosial covid-19 agar anggaran yang dikeluarkan untuk bantuan sama dengan jumlah penerima.
3. Masyarakat memiliki peranan penting dalam proses evaluasi dengan cara melaporkan apabila ada hal – hal yang mencurigakan terkait penyelewengan / korupsi dana bantuan.
4. Aparat penegak hukum harus tergas dalam menindak oknum kasus korupsi dana bantuan sosial covid – 19 karena korupsi secara yuridis telah dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*).